



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : JOKO PRI SUKMONO DWI WIDODO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 241671

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.520.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 405 m2/90 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, WARISAN Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 2535 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, WARISAN Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/48 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
4. Tanah Seluas 122 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 120.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOTOR, YAMAHA FAZIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 86.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 123.581.392



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.849.581.392
III. HUTANG	Rp.	370.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.479.581.392

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.